

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Kemiskinan juga merupakan masalah klasik yang harus diselesaikan. Artinya kemiskinan menjadi masalah yang harus dihadapi dan menjadi perhatian di setiap negara, termasuk di negara berkembang. Menurut para ahli ekonomi (dalam Arsyad,2010) kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensial. Kemiskinan yang bersifat multidimensial dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi.

Todaro (dalam Nursetyo, 2013) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumberdaya alam dan kualitas sumberdaya manusia, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain, dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Menurut *World Bank* (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Hal ini lah yang menjadi masalah dalam kemampuan setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing, karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimilikinya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sumber daya sosial. Dalam proses pembangunan ada daerah yang melimpah sumber daya alam tetapi kurang dalam sumber daya manusia, namun ada daerah yang sebaliknya kurang dalam hal sumber daya alam tapi melimpah dalam sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Keadaan ini selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan di masing-masing daerah. Kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat tidak jauh berbeda dengan nasional, yakni masih tingginya jumlah penduduk miskin jika di bandingkan dengan Provinsi lain di

pulau Kalimantan. Kalimantan Barat merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Kalimantan (Laporan BPS tahun 2013), dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2013 untuk Kalimantan Barat sebesar 8,74 %, Kalimantan Timur 6,96%, Kalimantan Tengah 6,57% dan untuk Kalimantan Selatan sebesar 5,09%. Untuk itu pemerintah provinsi perlu membuat kebijakan untuk mengantisipasi meningkatnya kemiskinan yang cukup tinggi di Kalimantan Barat, salah satunya dengan melakukan pembangunan di daerah yang dirasa kurang berkembang pembangunannya.

Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Untuk melihat berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu daerah maka perlu dilihat jumlah penduduk miskin yang ada di setiap daerah agar pembangunan yang dilakukan dapat terencana dengan baik dan tepat sasaran. Dengan melihat besarnya tingkat penduduk miskin dan kondisi wilayah di setiap daerah, maka rencana pembangunan pun akan dapat terealisasi dengan baik dan pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat untuk mengurangi besarnya tingkat kemiskinan yang ada di setiap daerah yang dirasa kurang dilakukannya pembangunan. Permasalahan kemiskinan yang ada di 14 kab/kota Kalimantan Barat merupakan tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Data di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat per Kabupaten/Kota dari tahun 2008-2013.

Table 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Tahun
2008-2013

No	Wilayah	(Ribuan Orang)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Sambas	61.5	53.82	50.00	46.980	44.450	51.2
2	Kab. Bengkayang	21.1	17.89	16.80	15.785	14.934	18.4
3	Kab. Landak	66	55.83	46.50	43.691	41.331	49.5
4	Kab. Pontianak	54.5	13.10	15.00	14.094	13.334	15.6
5	Kab. Sanggau	26.5	19.86	20.50	19.262	18.254	20.4
6	Kab. Ketapang	67.7	59.56	58.50	54.966	52.017	58.8
7	Kab. Sintang	54.1	46.95	35.50	33.356	31.589	39.0
8	Kab. Kapuas Hulu	27.3	24.09	25.30	23.772	22.509	26.4
9	Kab. Sekadau	14.8	12.62	12.20	11.557	10.971	13.2
10	Kab. Melawi	27.1	23.54	24.70	23.302	22.036	26.0
11	Kab. Kayong Utara	12.5	12.50	11.20	10.523	9.931	11.1
12	Kab. Kuburaya	37.1	37.09	35.90	33.731	31.871	32.1
13	Kota Pontianak	36.6	36.56	36.60	34.389	32.535	32.8
14	Kota Singkawang	12	11.99	11.40	10.711	10.119	13.0
Kalimantan Barat		509.8	425.39	400.10	376.120	355.700	407.3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Dari data di atas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat tahun 2008-2013 secara keseluruhan terus mengalami penurunan diantaranya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menjadi 509.8 ribu orang pada tahun 2008 menjadi 355.7 ribu orang pada tahun 2012, akan tetapi pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yakni menjadi 407.3 ribu orang. Kabupaten Ketapang merupakan daerah yang paling banyak jumlah penduduk miskinnya yaitu sebesar 67,7 ribu orang menjadi 58.8 ribu orang pada tahun 2013 meskipun pada tahun sebelumnya mengalami penurunan, disusul Kabupaten Sambas, Landak, Pontianak dan Sintang. Sedangkan Kota Singkawang paling sedikit jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 12 juta pada tahun 2008 menjadi 13 juta pada tahun 2013. Meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun

2013 karena terjadi kenaikan harga BBM yang memicu inflasi sehingga menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat.

Jumlah penduduk Kalimantan Barat yang tinggi dan terus bertambah, juga merupakan faktor penyebab tingginya angka kemiskinan. Teori Malthus dalam Skuosen (2009: 85) pada intinya menyatakan bahwa sumber daya bumi tidak bisa mengimbangi kebutuhan populasi yang terus bertambah, akibatnya kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya alam yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia bersifat terbatas, hal ini akan mendorong manusia mendekati garis kemiskinan karena persaingan yang cukup ketat dalam pemenuhan kebutuhan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun mengakibatkan permasalahan karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.

Di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap suplai bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia (Maier dalam Mudrajad Kuncoro,1997). Data di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk di Kalimantan Barat per Kabupaten/Kota dari tahun 2008-2013.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Tahun 2008-2013

No	Wilayah	(Ribuan Jiwa)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Sambas	485.366	490.690	496.120	501.149	505.444	515.571
2	Kab. Bengkayang	205.675	209.927	215.277	220.067	224.407	228.771
3	Kab. Landak	324.976	331.171	329.649	336.080	340.635	347.504
4	Kab. Pontianak	227.998	231.121	234.031	237.722	241.003	245.924
5	Kab. Sanggau	388.909	395.061	408.468	415.955	422.658	431.175
6	Kab. Ketapang	408.549	417.974	427.460	437.613	446.849	455.751
7	Kab. Sintang	365.058	373.380	364.759	371.322	377.190	384.692
8	Kab. Kapuas Hulu	217.736	220.043	222.160	227.424	231.512	236.136
9	Kab. Sekadau	178.129	180.649	181.634	184.103	186.266	190.048
10	Kab. Melawi	168.309	171.362	178.645	182.520	185.449	189.061
11	Kab. Kayong Uara	91.916	92.848	95.594	97.643	99.495	101.592
12	Kab. Kubu Raya	482.487	490.408	500.970	511.235	518.803	529.320
13	Kota. Pontianak	521.569	527.102	554.764	565.856	575.843	587.169
14	Kota. Singkawang	175.198	177.701	186.462	190.801	194.743	198.742
Kalimantan Barat		4.241.875	4.309.437	4.395.983	4.479.490	4.550.297	4.641.742

Sumber :Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Dari tabel 1.2, jumlah penduduk kabupaten/kota di Kalimantan Barat secara keseluruhan terjadi peningkatan setiap tahunnya yakni pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, Kota Pontianak merupakan kota yang tertinggi jumlah penduduknya yaitu sebesar 521.569 jiwa pada tahun 2008 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 587.169 jiwa, di ikuti Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya yaitu masing-masing sebesar 485.366 jiwa pada tahun 2008 menjadi 515.571 jiwa pada tahun 2013 dan 482.487 jiwa tahun 2008 meningkat menjadi 529.320 jiwa pada tahun 2013, sedangkan Kabupaten Kayong Utara jumlah penduduknya hanya sebesar 91.916 jiwa pada tahun 2008 menjadi 101.592 jiwa pada tahun 2013 meskipun juga terus mengalami peningkatan tetapi Kabupaten Kayong Utara masih memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit di bandingkan kabupaten/kota lainnya.

Dengan jumlah penduduk yang tinggi, seharusnya bisa di imbangi dengan peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing daerah mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. PDRB merupakan salah satu indikator-indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini.

Pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang. Tabel 1.3 menunjukkan dari tahun 2008 sampai tahun 2013 PDRB di Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan/2000
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 (Juta Rp)

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Sambas	2.629.916	2.793.917	2.934.449	3.101.957	3.284.446	3.481.219
2	Kab. Bengkayang	1.066.612	1.133.125	1.166.187	1.232.062	1.302.744	1.381.376
3	Kab. Landak	1.457.422	1.548.307	1.604.103	1.714.766	1.818.228	1.931.028
4	Kab. Pontianak	1.179.832	1.253.406	1.220.826	1.280.110	1.320.632	1.392.742
5	Kab. Sanggau	2.438.841	2.590.926	2.665.715	2.788.527	2.788.527	3.132.183
6	Kab. Ketapang	2.625.141	2.788.845	2.792.791	3.015.699	3.165.477	3.387.321
7	Kab. Sintang	1.880.857	1.998.146	2.086.074	2.199.676	2.327.768	2.475.239
8	Kab. Kapuas Hulu	1.091.423	1.159.484	1.182.106	1.236.014	1.305.362	1.383.779
9	Kab. Sekadau	600.923	633.064	668.125	708.549	750.687	801.061
10	Kab. Melawi	486.521	516.860	536.448	571.517	609.105	650.096
11	Kab. Kayong utara	399.971	411.101	435.430	461.256	488.989	518.352
12	Kab. Kubu Raya	4.389.636	4.647.318	4.936.653	5.258.029	5.609.791	5.990.818
13	Kota. Pontianak	5.968.286	6.340.467	6.211.934	7.010.567	7.436.240	7.950.260
14	Kota. Singkawang	1.111.268	1.165.501	1.230.090	1.309.554	1.390.547	1.479.043
Kalimantan Barat		27.438.791	28.756.876	30.328.699	32.141.382	34.007.555	36.076.786

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Dari tabel 1.3, PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat secara keseluruhan terjadi peningkatan setiap tahunnya yakni pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, Kota Pontianak merupakan kota yang tertinggi memberikan kontribusi PDRB yaitu sebesar 5,968,286 juta pada tahun 2008 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 7.950.260 juta, Selain Kota Pontianak, Kabupaten Sambas juga memberikan kontribusi terbesar pada PDRB yaitu sebesar 2.629.916 juta pada tahun 2008 dan terus meningkat menjadi 3.481.219 juta pada tahun 2013. sedangkan Kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil adalah Kabupaten Melawi dengan jumlah kontribusi hanya sebesar 486,521 juta pada tahun 2008 meskipun pada tahun 2013 kontribusinya meningkat menjadi 650.096 juta tetapi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya jumlah ini tentunya sangat jauh lebih kecil.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota agar dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.2. Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, salah satunya adalah negara berkembang, kemiskinan menjadi tolak ukur sosial ekonomi alam pembangunan di suatu daerah, dimana menurut para ahli kemiskinan bersifat multidimensial yang artinya kemiskinan dapat di lihat dari berbagai aspek yaitu aspek primer dan skunder. kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan Seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kemiskinan diantaranya kesehatan, pendidikan pendapatan, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan SDM dan lain-lain.

Jumlah penduduk yang tinggi dan terus bertambah di Kalimantan Barat juga merupakan salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan, dimana sumber daya alam yang sifatnya tidak terbatas berbanding terbalik dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas, sehingga mendorong manusia atau masyarakat berada dalam garis kemiskinan.

Seiring dengan jumlah penduduk yang tinggi seharusnya di imbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di setiap daerah mengidentifikasi bahwa pemerintah mampu menaikkan taraf hidup masyarakat, PDRB sebagai indikator dari pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya di Kalimantan Barat, otomatis sumber penerimaan juga bertambah sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini adalah **“APAKAH JUMLAH PENDUDUK DAN PDRB BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat antara lain :

1. Bagi penulis sebagai wujud penerapan ilmu-ilmu yang selama ini telah diperoleh selama kuliah sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu (S-1).
2. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya ekonomi pembangunan sehingga dapat

memperkaya penelitian sejenis yang telah ada dan juga dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

Universitas Tanjungpura